

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- , 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama.
- , 2002. *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Aminuddin Ilmar. 2012. *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*. Jakarta: Kencana.
- Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- , 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Andre Ata Ujan. 2001. *Keadilan dan Demokrasi; Telaah Filsafat Politik John Rawls*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Artidjo Alkostar. 2008. *Korupsi Politik Di Negara Modern*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Bagir Manan. 2001. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arif. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- , 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Kencana Prenada.
- Chaeruddin, dkk. 2008. *Strategai Pemberantasan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama.
- CST. Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- D. Andhi Nirwanto. 2013. *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Dahlan Thaib. 1993. *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Jakarta: Liberty.
- Darwan Prinst. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Citra Aditia Bakti.
- Djoko Prakoso. 1988. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberti.
- Eddy O.S. Hiariej. 2005. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Friedmann. 1971. *The State and The Rule of Law in Mixed Economy*. London: Steven & Son.
- H. Jawade Hafidz Arsyad. 2013. *Korupsi Dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.R Otje Salman. 2010. *Filsafat Hukum: Perkembangan dan Dinamika Masalah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Hartono. 2012. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana, Komentor Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Jeremi Pope. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Transparency Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas. 2015. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Cetakan ke- 5. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: Konstitusi Press. 2006.

- John Rawls. 2011. *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Laden Marpaung. 2001. *Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Perubahan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat. 2011. *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Marwan Effendi. 2005. *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- . 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana (Perkembangan Isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi)*, Jakarta: Referensi.
- Miriam Budiardjo. 1991. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Yasir Alimi, et.al. 1999. *Advokasi Hak-Hak Perempuan, Membela Hak Mewujudkan Perubahan*. Yogyakarta: LkiS.
- Muh. Erwin. 2011. *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Munir Fuady. 2003. *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- P.A.F. Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico.
- Philipus M Hadjon. 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cetakan ketiga. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Prajudi Atmosudirdjo. 1988. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan IX. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rhoda E. Howard. 2000. *HAM (Penjelajah Dalih Relativisme Budaya)*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- RM Surachman dan Jan S. Maringka. 2016. *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Robert Klitgaard. 2001. *Membasmi Korupsi*. Alih Bahasa Hermoyo, Cetakan Ke-2. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- S. F. Marbun. 1997. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Saifullah. 2007. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Satochid Kartanegara. 2005. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Satya Arinanto. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Cetakan ke-2. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Scott Davidson. 1994. *Hak Asasi Manusia*. Terjemahan. Jakarta: Grafmpers.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sri Sumantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Cetakan Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penintesiser Indonesia*. Jakarta: Alfabeta.
- Winarso Zain. 2004. *Korupsi Musuh Bersama*. Jakarta: Lembaga Pencegah Korupsi.
- Wirjono Prodjodikoro. 1980. *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta: PT. Eresco.

Artikel Ilmiah

- Adrianus Bawamenewi. 2019. *Implementasi Hak Politik Warga Negara*. Jurnal Warta, Volume 13 Nomor 3. Universitas Dharmawangsa. Medan.
- Anastasia Reni Widyastuti. 2015. *Disfungsionalisasi Birokrasi Sebagai Kendala Dalam Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Yustisia Volume 4 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

- Andi Akhirah Khairunnisa. 2018. *Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah*. Jurnal Manajemen Pemerintahan, Volume 5 Nomor 1. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Artidjo Alkostar. 2009. *Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintahan Di Negara Modern (Telaah Tentang Praktik Korupsi Politik dan Penanggulangannya)*. Jurnal Hukum Lus Quia Iustum, Edisi Khusus, Volume 16. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Asep Mulyana. 2015. *Perkembangan Pemikiran HAM*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Dina Fajar Indah, Haris Retno Susmiyati, Rini Apriyani. 2020. *Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Risalah Hukum, Volume 16 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Samarinda.
- Fernando I. Kansil. 2014. *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan Di Luar KUHP*. Jurnal Lex Crimen, Volume III Nomor 3. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Gunawan Jatmiko. 2006. *Analisis Terhadap Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Oleh Polisi*. Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 24 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan. Bandung.
- Ifdhal Kasim. 2000. *Dimensi-Dimensi HAM*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Latipah. 2017. *Pencabutan Hak Politik Bagi Terpidana Korupsi*. ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 1 Nomor 3b.
- Muh. Sabaruddin Sinapoy dan Safril Sofwan Sanib. 2019. *Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik Warga Negara Dalam Pemilu: Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia*. Halu Oleo Law Journal, Volume 3 Issue 2. Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo. Kendari.
- M. Fahmi Siregar. 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana dan HAM; Sebuah Potret Penegakan Hukum Pidana*. Makalah Peserta pada Training Tingkat Lanjut *Rule of Law* Bagi Dosen Hukum dan HAM, diselenggarakan pada Tanggal 3-6 Juni 2015. Pusat

Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia bekerjasama dengan Norsk Senter for Menneskerettigheter Norwegian Centre for Human Rights.

- Mardenis. 2013. Kontemplasi dan Analisis Terhadap Klasifikasi dan Politik Hukum Penegakan HAM Di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 2 Nomor 3. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
- Nurlely Darwis. 2013. *Penegakan Hukum Untuk Memperoleh Hak Atas Keadilan*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 3 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. Jakarta.
- Warih Anjari. 2015. *Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia; Kajian Putusan Nomor 537K/Pid.Sus/2014 dan Nomor 1195K/Pid.Sus/2014*. *Jurnal Yudisial*, Volume 8 Nomor 1, Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta.
- Wiwik Utami. 2018. *Analisis Kontroversi Pencabutan Hak Politik Terpidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Maksiqama: *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 12 Nomor 2. Universitas Wisnuwardhana. Malang.
- Yaris Adhial Fajrin dan Ach. Faisol Triwijaya. 2020. *Pencegahan Korupsi Melalui Pencabutan Hak Politik: Sebuah Telaah Dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. *Pandecta Research Law Journal*, Volume 15 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Y. Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Gramedia Widiarsana Indonesia.

Sumber Internet

- Abdul Razak. 2012. *Hakikat Peraturan Kebijakan*. Sumber: <https://www.negarahukum.com/hakikat-peraturan-kebijakan.html>
- Anonim. *Negara Hukum (Rechtstaat)*. Sumber: <https://istilahhukum.wordpress.com/2012/07/25/negara-hukum-rechtstaat/>,

- Asep Mulyana. *Perkembangan Pemikiran HAM*. Dipublikasikan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Tahun 2015. Sumber: <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/01/Perkembangan-Pemikiran-HAM.pdf>
- Dylan Aprialdo Rachman, *KPK: Hak Politik 26 Koruptor Dicabut Sepanjang 2013-2017*, sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/18/13252541/kpk-hak-politik-26-koruptor-dicabut-sepanjang-2013-2017>
- Fitria Chusna Farisa, *KALEIDOSKOP 2019: Batalnya Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada hingga Putusan MK*. Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/17/20302971/kaleidoskop-2019-batalnya-larangan-eks-koruptor-ikut-pilkada-hingga-putusan?page=all>
- <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/19/15075331/daftar-lengkap-81-caleg-eks-koruptor?page=all>.
- <https://antikorupsi.org/id/article/waspadai-caleg-mantan-napi-korupsi>
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17349>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Lihat dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- N. Suryawati. 2020. *Hakikat Hak Asasi Politik*. Sumber: <http://repositori.ukdc.ac.id/524/10/Buku%20Hak%20Asasi%200Politik%20Perempuan-Bab%20VII.pdf>. Diunduh tanggal 20 Juni 2022
- Pan Mohamad Faiz. *Reformasi Hukum dan Sinergitas Antar Lembaga Negara; Mencegah Ketidakpercayaan Rakyat Terhadap Simbol-Simbol Negara*. Sumber: <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/02/REFORMASI-HUKUM-DAN-SINERGITAS-ANTAR-LEMBAGA-NEGARA.pdf>
- Rimawan Pradiptyo, 2011, *Penegakan Hukum dan Pencegahan Tindak Kejahatan dalam Tinjauan Ilmu Ekonomi*. Sumber: <https://feb.ugm.ac.id/id/penelitian/artikel-dosen/826-penegakan-hukum-dan-pencegahan-tindak-kejahatan-dalam-tinjauan-ilmu-ekonomi>.